



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II LHOKSEUMAWE**

NOMOR SOP	: OT.02.02/C.IX.15/2117/2026
TANGGAL PEMBUATAN	: 27 AGUSTUS 2026
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 27 AGUSTUS 2026
DISAHKAN OLEH	Plt. KEPALA BALAI
	 Ns. HUSIN, S.Kep, M.S.M NIP. 198003122008121003
NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DASAR HUKUM	KLASIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait 2 Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 3 Menguasai penggunaan komputer dan internet
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
1 SOP Pengelolaan Permohonanan Informasi 2 SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi 3 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik 4 SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP 5 SOP Pengujian tentang Konsekuensi 6 SOP Pendokumentasian informasi publik	1 Alat Tulis 2 Komputer, printer, scanner 3 Jaringan Internet 4 Formulir permohonan informasi 5 Daftar Informasi Publik
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Prosedur Dokumentasi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tidak dilaksanakan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	1 SOP Dokumentasi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekeantinaan Kesehatan 2 Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online 3 Laporan pelayanan informasi publik

Prosedur : Dokumentasi Informasi Yang Dikecualikan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Penanggungjawab PPID	Ketua PPID	Tim PPID	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mengkoordinasikan penelaahan informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Agenda kerja	15 Menit	Disposisi	
2	Memberikan masukan atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Disposisi	15 Menit	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
3	Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	60 Menit	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Bahan dokumen klasifikasi informasi	300 Menit	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
5	Merumuskan dan membahas dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	60 Menit	Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
6	Membuat lembar perubahan informasi yang dikecualikan					Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	30 Menit	Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
7	Meminta pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk lembar perubahan informasi yang dikecualikan					Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	15 Menit	Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
8	Melakukan pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	60 Menit	Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
9	Menetapkan perubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk penetapan					Draft Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	60 Menit	Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
10	Membuat laporan perubahan informasi yang dikecualikan					Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	60 Menit	Laporan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
11	Mendokumentasikan klasifikasi informasi yang dikecualikan					Laporan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan	5 Menit	Klasifikasi informasi yang dikecualikan	